



**PENJELASAN ATAS POS-POS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Mahkamah Agung mendapatkan izin penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-446/MK.02/2020 tanggal 29 Mei 2020 perihal Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan surat tersebut Mahkamah Agung mendapatkan tambahan anggaran belanja dari PNBP yang dapat digunakan kembali sebesar 21% dari PNBP yang telah disetorkan ke kas negara. Sesuai peraturan perundangan, sebagian dana PNBP dapat digunakan oleh instansi yang bersangkutan untuk kegiatan tertentu. Mahkamah Agung mengajukan permohonan penggunaan PNBP bertujuan untuk belanja:

1. Operasional Mahkamah Agung dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi Mahkamah Agung.
2. Non Operasional antara lain:
 - a. Pelaksanaan pembinaan, monitoring PNBP, dan sosialisasi peraturan PNBP.
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kepaniteraan dan kesekretariatan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya
 - c. Pengadaan kebutuhan fasilitas pendukung perkantoran untuk pelayanan pada pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Alokasi Pagu Anggaran pada Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Alokasi Pagu Anggaran Mahkamah Agung TA 2021

Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 mendapatkan alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp11.247.750.206.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

- Berdasarkan per program

(Dalam Rupiah)

Kode	Program	Rincian Pagu Alokasi Anggaran
005.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	163.551.024.000,00
005.WA	Program Dukungan Manajemen	11.084.199.182.000,00
Jumlah		11.247.750.206.000,00

- Berdasarkan Unit Eselon I

(Dalam Rupiah)

Kode	Program	Rincian Pagu Alokasi Anggaran
005.01	Badan Urusan Administrasi	10.586.489.472.000,00
005.02	Kepaniteraan	190.819.514.000,00
005.03	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	138.713.875.000,00
005.04	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	90.307.567.000,00
005.05	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	29.213.195.000,00
005.06	Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	172.085.320.000,00
005.07	Badan Pengawasan Mahkamah Agung	40.121.263.000,00
Jumlah		11.247.750.206.000,00

- Berdasarkan Jenis Belanja

(Dalam Rupiah)

Kode	Program	Rincian Pagu Alokasi Anggaran
51	Belanja Pegawai	7.257.296.650.000,00
52	Belanja Barang	2.308.226.161.000,00
53	Belanja Modal	1.682.227.395.000,00
Jumlah		11.247.750.206.000,00

- Alokasi anggaran sebagian besar digunakan untuk belanja operasional yaitu pembayaran gaji dan tunjangan, tunjangan kinerja untuk ASN dan Hakim serta operasional Satuan Kerja pengadilan;
- Pagu anggaran Mahkamah Agung RI Tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2020 yaitu untuk memenuhi:
 - Pembayaran belanja pegawai atas penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2020 yang mulai melaksanakan tugas pada bulan Februari 2021 sebanyak 2.085 pegawai;
 - Peningkatan Layanan Internet Satuan Kerja Daerah
Penambahan anggaran langganan internet Satuan Kerja daerah dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan persidangan secara daring yang selama ini terkendala oleh kualitas internet yang kurang stabil sehingga mengakibatkan proses persidangan tidak lancar;

3) Kebutuhan Teknologi Informasi

Mahkamah Agung membutuhkan peningkatan kapasitas *server* dan *storage* direktori putusan untuk pengolahan dan penyimpanan data yang selama ini belum cukup untuk menampung kebutuhan pengolahan dan penyimpanan data serta untuk penggantian jaringan IT gedung Pusat yang selama ini belum optimal;

4) Peningkatan Pelayanan Peradilan

Dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan peradilan menuju modernisasi peradilan berbasis elektronik, pembebasan biaya perkara, sidang keliling, posbakum, dan *zitting plaats*;

5) Pembangunan Gedung Kantor

Dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dalam meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka pada Tahun 2021 akan dibangun 12 gedung kantor pengadilan baru dan 24 pembangunan gedung kantor *multiyears* yang merupakan pembangunan berkelanjutan dari 85 gedung kantor pengadilan baru yang telah diresmikan operasionalnya pada tanggal 22 Oktober 2018.

Alokasi Anggaran untuk Pembangunan *Multiyears* 24 gedung kantor pengadilan baru dengan rincian:

(Dalam Rupiah)

No.	Satuan Kerja	Alokasi Pembangunan Gedung (TA 2021)
1	Pengadilan Negeri Cikarang	36.155.347.000,00
2	Pengadilan Negeri Suka Makmue	23.096.918.000,00
3	Pengadilan Negeri Sei Rampah	30.003.785.000,00
4	Pengadilan Agama Sei Rampah	22.234.025.000,00
5	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	22.532.814.000,00
6	Pengadilan Agama Pulau Punjung	17.603.048.000,00
7	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	18.575.545.000,00
8	Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	18.488.465.000,00
9	Pengadilan Agama Mesuji	20.165.705.000,00
10	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	17.227.220.000,00
11	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	22.371.545.000,00
12	Pengadilan Negeri Penajam	23.075.945.000,00
13	Pengadilan Agama Lolak	17.880.745.000,00
14	Pengadilan Negeri Melonguane	33.211.465.000,00
15	Pengadilan Agama Ampana	21.188.376.000,00
16	Pengadilan Agama Lasusua	15.962.087.000,00
17	Pengadilan Negeri Lasusua	21.142.185.000,00
18	Pengadilan Negeri Mukomuko	18.917.945.000,00
19	Pengadilan Negeri Koba	18.850.814.000,00
20	Pengadilan Negeri Gedong Tataan	19.155.057.000,00
21	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	25.720.625.000,00
22	Pengadilan Agama Malili	17.848.105.000,00
23	Pengadilan Negeri Belopa	18.059.385.000,00
24	Pengadilan Agama Kepahiang	13.571.145.000,00
Jumlah		513.038.296.000,00

Alokasi Anggaran untuk Pembangunan 12 gedung kantor pengadilan baru dengan rincian:

(Dalam Rupiah)

No.	Satuan Kerja	Alokasi Pembangunan Gedung (TA 2021)
1	Pengadilan Agama Penajam	26.660.911.000,00
2	Pengadilan Agama Belopa	22.329.238.000,00
3	Pengadilan Agama Suwawa	24.148.600.000,00
4	Pengadilan Agama Namlea	25.908.100.000,00
5	Pengadilan Negeri Blangpidie	36.362.795.000,00
6	Pengadilan Negeri Mentok	32.857.000.000,00
7	Pengadilan Negeri Wangi Wangi	35.119.400.000,00
8	Pengadilan Negeri Namlea	38.378.137.000,00
9	Pengadilan Agama Prabumulih	24.420.000.000,00
10	Pengadilan Agama Pringsewu	20.607.500.000,00
11	Pengadilan Agama Sukadana	17.306.243.000,00
12	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang	28.810.174.000,00
Jumlah		332.908.098.000,00

2. Perubahan Rincian Anggaran dan Kebijakan Mahkamah Agung dalam Penanganan Pandemi COVID-19

a. Perubahan Rincian Anggaran

1) *Refocussing Anggaran*

Dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja Program Pemulihan Ekonomi Nasional yaitu mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi COVID-19, serta dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat. Mahkamah Agung telah melakukan *refocussing* anggaran melalui 2 tahap, yaitu:

a) Penghematan belanja pegawai sebesar Rp326.937.533.000,00 dari alokasi tunjangan kinerja THR dan tunjangan kinerja ke-13 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-408/MK.02/2021 tanggal 18 Mei 2021 perihal Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021.

Hal ini seiring dengan kebijakan pemerintah bahwa tidak dibayarkannya Tunjangan Kinerja THR dan Tunjangan Kinerja ke-13 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021.

b) Penghematan belanja barang dan modal sebesar Rp197.124.205.000,00 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021

perihal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 Tahap IV.

Penghematan ini diantaranya dilakukan dengan relaksasi belanja modal pembangunan gedung dan bangunan yang belum selesai dilaksanakan dari *Singleyear Contract* menjadi *Multiyears Contract* (MYC), pemotongan sisa anggaran belanja barang kegiatan bimbingan teknis pada Pengadilan Tingkat Banding dan pemotongan sisa anggaran belanja perjalanan dinas pada Satuan Kerja Eselon I.

2) Izin Penggunaan Dana PNB

Tahun 2020 Mahkamah Agung mendapat persetujuan penggunaan dana PNB dari pemerintah, berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-446/MK.02/2020 Tanggal 29 Mei 2020 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Mahkamah Agung paling tinggi sebesar 21% (dua puluh satu persen) dari realisasi Rp75.439.089.000,00. Setelah pembahasan dengan Bappenas tentang revisi anggaran Renja/RKA MA TA 2021 terkait pembiayaan kegiatan melalui sumber PNB bahwa Penggunaan dana PNB dialokasikan untuk kegiatan: (1) Sosialisasi PNB Teknis (2) Rapat koordinasi teknis percepatan penyelesaian perkara, (3) Pembinaan dan pemeriksaan teknis dan administrasi yustisial Tingkat Banding ke Tingkat Pertama. Hal ini merupakan sebuah prestasi untuk Mahkamah Agung dimana yang selama ini PNB hanya disetor dan belum bisa digunakan kembali. Satuan Kerja Mahkamah Agung yang mendapatkan penggunaan dana PNB telah dialokasikan langsung oleh masing-masing unit Eselon I sebesar Rp4.354.717.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung

(Dalam Rupiah)

No	Kode Satker	Satuan Kerja	Pagu	MP Tahap III
1	099062	Pengadilan Tinggi Jakarta	12.870.000,00	12.866.000,00
2	099063	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	5.000.000,00	0,00
3	099064	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	5.000.000,00	0,00
4	099065	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	5.000.000,00	0,00
5	099067	Pengadilan Tinggi Bandung	82.870.000,00	82.870.000,00
6	099074	Pengadilan Negeri Serang	6.470.000,00	0,00
7	099077	Pengadilan Negeri Tangerang	5.000.000,00	0,00
8	099090	Pengadilan Tinggi Semarang	52.870.000,00	52.772.498,00
9	099092	Pengadilan Negeri Semarang	7.700.000,00	0,00

10	099115	Pengadilan Negeri surakarta	7.150.000,00	7.150.000,00
11	099128	Pengadilan Negeri Yogyakarta	9.450.000,00	9.450.000,00
12	099169	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	90.740.000,00	87.870.000,00
13	099189	Pengadilan Tinggi Medan	52.870.000,00	0,00
14	099190	Pengadilan Negeri Medan	13.000.000,00	0,00
15	099195	Pengadilan Negeri Rantau Prapat	5.650.000,00	0,00
16	099200	Pengadilan Negeri Tarutung	5.150.000,00	0,00
17	099204	Pengadilan Tinggi Padang	42.870.000,00	36.619.000,00
18	099205	Pengadilan Negeri Padang	8.750.000,00	7.200.000,00
19	099214	Pengadilan Negeri Pekanbaru	8.850.000,00	0,00
20	099220	Pengadilan Negeri Jambi	5.300.000,00	5.300.000,00
21	099225	Pengadilan Tinggi Palembang	42.870.000,00	42.443.226,00
22	099226	Pengadilan Negeri Palembang	10.000.000,00	9.975.000,00
23	099239	Pengadilan Negeri Pontianak	7.150.000,00	7.100.000,00
24	099253	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	62.870.000,00	59.579.870,00
25	099254	Pengadilan Negeri Banjarmasin	5.400.000,00	5.400.000,00
26	099287	Pengadilan Negeri Samarinda	11.550.000,00	0,00
27	099309	Pengadilan Negeri Balikpapan	7.300.000,00	7.055.800,00
28	099313	Pengadilan Tinggi Manado`	52.870.000,00	0,00
29	099330	Pengadilan Negeri Manado	8.900.000,00	4.900.000,00
30	099355	Pengadilan Negeri Tondano	8.050.000,00	6.000.000,00
31	099423	Pengadilan Negeri Ujung Pandang	10.000.000,00	0,00
32	099444	Pengadilan Negeri Pangkajene	8.500.000,00	8.400.000,00
33	099692	Pengadilan Tinggi Ambon	80.870.000,00	0,00
34	099774	Pengadilan Tinggi Denpasar	44.870.000,00	0,00
35	099781	Pengadilan Negeri Denpasar	10.000.000,00	6.585.650,00
36	099795	Pengadilan Negeri Singaraja	8.000.000,00	8.000.000,00
37	109064	Pengadilan Negeri Batam	10.650.000,00	10.650.000,00
38	400023	Pengadilan Tinggi Jayapura	162.870.000,00	156.270.000,00
39	400215	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	5.000.000,00	0,00
40	400246	Pengadilan Tinggi Kupang	77.870.000,00	0,00
41	400252	Pengadilan Tinggi Pontianak	52.870.000,00	52.870.000,00
42	400343	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	28.070.000,00	28.070.000,00
43	400365	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	42.870.000,00	42.870.000,00
44	400396	Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	7.600.000,00	0,00
45	400493	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	42.870.000,00	42.870.000,00
46	400541	Pengadilan Tinggi Kendari	48.510.000,00	43.140.000,00
47	400560	Pengadilan Tinggi Mataram	40.000.000,00	40.000.000,00
48	663399	Pengadilan Tinggi Banten	32.870.000,00	28.485.000,00
49	663404	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	42.870.000,00	40.760.000,00

50	664523	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	67.870.000,00	66.729.169,00
51	664540	Pengadilan Tinggi Gorontalo	42.870.000,00	39.980.000,00
52	670211	Pengadilan Negeri Airmadidi	6.200.000,00	5.040.000,00
Jumlah			1.523.620.000,00	1.065.271.213,00

b) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung

(Dalam Rupiah)

No	Kode Satker	Satuan Kerja	Pagu	MP Tahap III
1	309067	Pengadilan Tinggi Agama Makassar	143.836.000,00	142.544.700,00
2	309124	Pengadilan Tinggi Agama Bandung	139.033.000,00	0,00
3	309125	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	184.795.000,00	93.418.000,00
4	401113	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	60.250.000,00	0,00
5	401583	Mahkamah Syaria'ah Aceh	127.210.000,00	127.210.000,00
6	401778	Pengadilan Tinggi Agama Medan	119.512.000,00	0,00
7	401901	Pengadilan Tinggi Agama Padang	105.235.000,00	0,00
8	402237	Pengadilan Tinggi Agama Palembang	77.344.000,00	77.229.300,00
9	402450	Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin	80.650.000,00	57.524.000,00
10	402481	Pengadilan Tinggi Agama Samarinda	92.842.000,00	0,00
11	402651	Pengadilan Tinggi Agama Pontianak	81.267.000,00	0,00
12	402682	Pengadilan Tinggi Agama Manado	72.064.000,00	72.044.000,00
13	402711	Pengadilan Tinggi Agama Ambon	58.993.000,00	0,00
14	402789	Pengadilan Tinggi Agama Mataram	102.242.000,00	75.175.432,00
15	402861	Pengadilan Tinggi Agama Jayapura	96.552.000,00	80.262.300,00
16	402965	Pengadilan Tinggi Agama Semarang	174.130.000,00	144.826.800,00
17	402971	Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru	102.310.000,00	100.904.800,00
18	402990	Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya	89.614.000,00	15.735.195,00
19	440713	Pengadilan Tinggi Agama Banten	78.184.000,00	59.502.000,00
20	440729	Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung	50.779.000,00	49.565.200,00
21	440735	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	60.694.000,00	53.745.000,00
22	440741	Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara	53.041.000,00	26.091.000,00
23	547658	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	84.539.000,00	0,00
24	547662	Pengadilan Tinggi Agama Jambi	73.339.000,00	27.420.000,00
25	547679	Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	88.313.000,00	60.171.475,00
26	576250	Pengadilan Tinggi Agama Palu	75.619.000,00	70.219.000,00
27	576254	Pengadilan Tinggi Agama Kendari	75.169.000,00	75.119.000,00
28	576261	Pengadilan Tinggi Agama Kupang	90.868.000,00	68.464.300,00
29	576275	Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu	72.673.000,00	53.070.000,00
Jumlah			2.711.097.000,00	1.530.241.502,00

c) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung

(Dalam Rupiah)

No	Kode Satker	Satuan Kerja	Pagu	MP Tahap III
1	526705	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	30.000.000,00	0,00
2	526712	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar	30.000.000,00	14.453,00
3	526726	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan	30.000.000,00	21.385,00
4	548941	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	30.000.000,00	0,00
Jumlah			120.000.000,00	35.838,00

3) Hibah Langsung Dalam Negeri

Terdapat Hibah Langsung Dalam Negeri sebesar Rp8.650.260.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satker	Nama Satuan Kerja	Pagu Hibah
1	098413	Pengadilan Negeri Bangkalan	50.000.000,00
2	401971	Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo	38.000.000,00
3	613519	Pengadilan Negeri kab. Bogor di Cibinong, Jawa Barat	8.562.260.000,00
Jumlah			8.650.260.000,00

Berikut perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan belanja negara Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp519.859.581.000,00 pada Mahkamah Agung.

Pagu Penyesuaian Anggaran TA 2021 per Program sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Program	Pagu Semula	Pergeseran	Pagu Menjadi
Rupiah Murni			
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	163.551.024.000,00	(4.624.466.000,00)	158.926.558.000,00
Program Dukungan Manajemen	11.084.199.182.000,00	(528.240.092.000,00)	10.555.959.090.000,00
Jumlah Belanja Rupiah Murni	11.247.750.206.000,00	(532.864.558.000,00)	10.714.885.648.000,00
PNBP			
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	0,00	4.354.717.000,00	4.354.717.000,00
Jumlah Belanja PNBP	0,00	4.354.717.000,00	4.354.717.000,00
Hibah Langsung Dalam Negeri			
Program Dukungan Manajemen	0,00	8.650.260.000,00	8.650.260.000,00
Jumlah Belanja Hibah Langsung Dalam Negeri	0,00	8.650.260.000,00	8.650.260.000,00
Jumlah	11.247.750.206.000,00	(519.859.581.000,00)	10.727.890.625.000,00

Pagu Penyesuaian Anggaran TA 2021 per Eselon I sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Unit Eselon I	Pagu Semula	Pergeseran	Pagu Menjadi
1	Badan Urusan Administrasi	10.586.489.472.000,00	(492.573.655.000,00)	10.093.915.817.000,00
2	Kepaniteraan	190.819.514.000,00	7.682.848.000,00	198.502.362.000,00
3	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	138.713.875.000,00	(2.924.093.000,00)	135.789.782.000,00
4	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	90.307.567.000,00	610.299.000,00	90.917.866.000,00
5	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN	29.213.195.000,00	(1.757.000.000,00)	27.456.195.000,00
6	Balitbang Diklat Kumdil	172.085.320.000,00	(15.522.293.000,00)	156.563.027.000,00
7	Badan Pengawasan	40.121.263.000,00	(15.375.687.000,00)	24.745.576.000,00
Jumlah		11.247.750.206.000,00	(519.859.581.000,00)	10.727.890.625.000,00

Pagu Penyesuaian Anggaran TA 2021 per Kelompok Belanja sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Jenis Belanja	Pagu Semula	Pergeseran	Pagu Menjadi
1	Belanja Pegawai	7.257.296.650.000,00	(336.958.841.000,00)	6.920.337.809.000,00
2	Belanja Barang	2.308.226.161.000,00	(101.652.473.000,00)	2.206.573.688.000,00
3	Belanja Modal	1.682.227.395.000,00	(81.248.267.000,00)	1.600.979.128.000,00
Jumlah		11.247.750.206.000,00	(519.859.581.000,00)	10.727.890.625.000,00

Perubahan tersebut berdasarkan sumber Pendapatan dan Jenis Belanja adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	2021	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	7.117.556.000,00	7.117.556.000,00
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	62.664.318.000,00	62.664.318.000,00
Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	
Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	2.910.000,00	2.910.000,00
Pendapatan Denda	0,00	0,00
Pendapatan Lain-Lain	16.161.000,00	16.161.000,00
Jumlah Pendapatan	69.800.945.000,00	69.800.945.000,00
Belanja		
Belanja Pegawai	7.257.296.650.000,00	6.920.337.809.000,00
Belanja Barang	2.308.226.161.000,00	2.206.573.688.000,00
Belanja Modal	1.682.227.395.000,00	1.600.979.128.000,00
Jumlah Belanja	11.247.750.206.000,00	10.727.890.625.000,00

b. Kebijakan Mahkamah Agung dalam Penanganan Pandemi COVID-19

Berdasarkan pasal 4 PMK Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, Bagan Akun Standar (termasuk segmen akun) digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-KL

dan DIPA, pelaksanaan anggaran, pelaporan, dan proses validasi transaksi keuangan Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan adanya pemutakhiran akun dalam rangka penanganan pandemi COVID- 19, maka Mahkamah Agung dalam melakukan perencanaan/pengalokasian/revisi DIPA dan pelaksanaan anggaran serta pelaporan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 perlu untuk menggunakan segmen akun khusus COVID-19 sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-135/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.

Adapun rincian penggunaan akun khusus COVID-19 pada Mahkamah Agung per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19 (521131)
Pembelian alat-alat kesehatan berupa masker/*hand sanitizer* (habis pakai) yang diperuntukkan bagi pegawai dalam rangka mendukung operasional kantor agar dapat berjalan dengan baik termasuk yang diadakan dalam rangka mendukung pelayanan (secara sewajarnya) dan tidak menghasilkan persediaan, dan penyemprotan desinfektan di area kantor dan sekitarnya yang dilaksanakan dengan swakelola;
- 2) Belanja Barang Non Operasional Penanganan Pandemi COVID-19 (521241)
Diperuntukan untuk penyelenggaraan tugas fungsi dan pencapaian target kinerja berupa pengadaan APD/*Rapid test* dan sejenisnya yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap Peralatan dan Mesin/Persediaan;
- 3) Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19 (521841)
Pengadaan *hand sanitizer*, masker, sarung tangan dalam rangka mendukung operasional kantor agar dapat berjalan dengan baik dan mendukung pelayanan yang diniatkan untuk disimpan sebagai persediaan;
- 4) Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (522192)
Pembayaran biaya penyemprotan desinfektan dan pelaksanaan *Rapid Test* COVID-19 dengan menggunakan jasa pihak ketiga (dimana pihak ketiga merupakan pihak yang berkompeten untuk memberikan jasa penyemprotan desinfektan dan pelaksanaan *Rapid Test* COVID-19);

5) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19 (523114)

Pembelian/pengadaan tempat cuci tangan baik *portable* maupun permanen yang menjadi bagian dari suatu Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan.

Realisasi

Pendapatan

Negara Bukan

Pajak

Rp96.521.922.

988,00

B.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp96.521.922.988,00 atau mencapai 138,28% dari Estimasi Pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp69.800.945.000,00.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Mahkamah Agung Republik Indonesia per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(Dalam Rupiah)

Kode Perkiraan	Uraian	2021				
		Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan Bruto	Pengembalian Pendapatan	Realisasi Pendapatan Neto	% Realisasi Anggaran
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	305.784.500,00	0,00	305.784.500,00	0,00
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	40.150.000,00	1.707.342.248,00	0,00	1.707.342.248,00	4.252,41
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	10.850.000,00	1.811.446.124,00	0,00	1.811.446.124,00	16.695,36
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	7.066.556.000,00	10.309.178.788,00	3.067.406,00	10.306.111.382,00	145,84
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	414.444.000,00	182.880.000,00	0,00	182.880.000,00	44,13
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitia Badan	2.899.438.000,00	2.829.972.501,00	190.000,00	2.829.782.501,00	97,60
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	25.007.346.000,00	24.397.180.028,00	1.920.000,00	24.395.260.028,00	97,55
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	34.343.090.000,00	48.886.564.640,00	2.378.000,00	48.884.186.640,00	142,34
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	1.622.000,00	98.186.302,00	0,00	98.186.302,00	6.053,41
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	1.288.000,00	34.622.974,00	0,00	34.622.974,00	2.688,12
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0,00	66.300.000,00	0,00	66.300.000,00	0,00
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	1.740.462.541,00	0,00	1.740.462.541,00	0,00
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	14.969.000,00	1.226.175.779,00	0,00	1.226.175.779,00	8.191,43
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.147.000,00	2.061.381.039,00	0,00	2.061.381.039,00	179.719,36
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	543.119.259,00	0,00	543.119.259,00	0,00
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0,00	277.369.054,00	0,00	277.369.054,00	0,00
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	45.000,00	45.318.483,00	0,00	45.318.483,00	100.707,74
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	6.192.718,00	0,00	6.192.718,00	0,00
Jumlah Pendapatan		69.800.945.000,00	96.529.478.394,00	7.555.406,00	96.521.922.988,00	138,28

Realisasi Pendapatan untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp96.521.922.988,00 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp84.173.439.409,00, terdapat kenaikan sebesar Rp12.348.483.579,00 atau 14,67%.

Penerimaan PNBPN Mahkamah Agung per Triwulan pada Tahun 2021 atas akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan serta akun PNBPN Fungsional dapat dijelaskan sebagai berikut:

(*Dalam Rupiah*)

Kode Perkiraan	Periode				Jumlah
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
425131	3.231.354.648,00	1.861.265.006,00	2.787.406.280,00	2.426.085.448,00	10.306.111.382,00
425231	49.480.000,00	52.810.000,00	37.170.000,00	43.420.000,00	182.880.000,00
425232	734.382.500,00	668.950.000,00	617.730.001,00	808.720.000,00	2.829.782.501,00
425233	6.891.685.000,00	5.699.090.000,00	5.777.985.000,00	6.026.500.028,00	24.395.260.028,00
425239	12.269.231.457,00	11.199.707.538,00	11.590.723.589,00	13.824.524.056,00	48.884.186.640,00
Jumlah	23.176.133.605,00	19.481.822.544,00	20.811.014.870,00	23.129.249.532,00	86.598.220.551,00

Gambaran informasi penerimaan di atas menggunakan 1 akun signifikan dari PNBPN Umum dan 4 akun signifikan dari PNBPN Fungsional berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya. Penurunan PNBPN Fungsional terjadi pada Triwulan II karena peningkatan penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia dan pemberlakuan PPKM. Hal ini menyebabkan Satuan Kerja di Pengadilan Tingkat Pertama mengalami penurunan pendaftaran perkara yang masuk dan juga proses persidangan. Selain itu terjadi penurunan PNBPN umum pada akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131) dikarenakan kondisi perekonomian masyarakat yang belum stabil pada masa pandemi. Dan beranjak mengalami peningkatan kembali pada Triwulan IV.

Perbandingan rincian Realisasi PNBP Mahkamah Agung Republik Indonesia per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. Perbandingan Rincian Realisasi PNBP

(Dalam Rupiah)

Kode Perkiraan	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	
				(Rp)	%
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	305.784.500,00	43.465.999,00	262.318.501,00	603,50
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.707.342.248,00	1.096.272.163,00	611.070.085,00	55,74
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.811.446.124,00	755.569.365,00	1.055.876.759,00	139,75
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	10.306.111.382,00	6.950.565.144,00	3.355.546.238,00	48,28
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	182.880.000,00	245.930.000,00	(63.050.000,00)	(25,64)
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	2.829.782.501,00	2.873.491.000,00	(43.708.499,00)	(1,52)
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	24.395.260.028,00	23.287.692.640,00	1.107.567.388,00	4,76
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	48.884.186.640,00	45.306.261.981,00	3.577.924.659,00	7,90
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00
425761	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	0,00	840.444,00	(840.444,00)	(100,00)
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	98.186.302,00	105.137.183,00	(6.950.881,00)	(6,61)
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	34.622.974,00	31.547.973,00	3.075.001,00	9,75
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	66.300.000,00	50.000.000,00	16.300.000,00	32,60
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.740.462.541,00	424.884.899,00	1.315.577.642,00	309,63
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1.226.175.779,00	545.392.804,00	680.782.975,00	124,82
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	2.061.381.039,00	730.656.117,00	1.330.724.922,00	182,13
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	543.119.259,00	1.375.718.936,00	(832.599.677,00)	(60,52)
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	277.369.054,00	156.004.131,00	121.364.923,00	77,80
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	45.318.483,00	170.649.042,00	(125.330.559,00)	(73,44)
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	6.192.718,00	23.359.588,00	(17.166.870,00)	(73,49)
Jumlah Pendapatan		96.521.922.988,00	84.173.439.409,00	12.348.483.579,00	14,67

Dari angka dan grafik di bawah ini memang ada kenaikan dan penurunan, secara keseluruhan Tahun 2021 lebih besar jumlah realisasi PNBP-nya dibandingkan dengan Tahun 2020, terutama pada kelompok akun 4252 Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum, yang lebih mengutamakan kepada pelayanan yang diberikan oleh Peradilan.

Perbandingan realisasi PNBП per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:



Penjelasan tambahan atas realisasi PNBП:

- Pendapatan Jasa Lainnya (425699) sebesar Rp1.416,00 terdapat pada Satuan Kerja 005.03.099136 Pengadilan Negeri Tuban merupakan pendapatan yang berasal dari mesin EDC atau sejenisnya;
- Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) (425764) sebesar Rp98.186.302,00 terdapat pada 29 Satuan Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
1	005.01.098324	Pengadilan Negeri Bangil	413.768,00
2	005.01.099549	Pengadilan Negeri Watansopeng	706.850,00
3	005.01.307708	Pengadilan Agama Raha	1,00
4	005.01.578818	Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh	56.580,00
5	005.01.663182	Pengadilan Militer I - 01 di Banda Aceh	17.700,00
6	005.03.099094	Pengadilan Negeri Pekalongan	1.096.582,00
7	005.03.099099	Pengadilan Negeri Kendal	47.828.260,00
8	005.03.099111	Pengadilan Negeri Kebumen	65.509,00
9	005.03.099146	Pengadilan Negeri Situbondo	353.434,00
10	005.03.099172	Pengadilan Negeri Sigli	13.181.000,00
11	005.03.099239	Pengadilan Negeri Pontianak	264.036,00
12	005.03.400209	Pengadilan Negeri Limboto	4.602.965,00
13	005.03.613520	Pengadilan Negeri Kab. Bogor di Cibinong, Jawa Barat	21.440.778,00
14	005.04.309052	Pengadilan Agama Tenggara	341.342,00
15	005.04.309102	Pengadilan Agama Morotai	568,00
16	005.04.309103	Pengadilan Agama Soa Sio	889,00
17	005.04.400679	Pengadilan Agama Sumedang	3.796.168,00
18	005.04.400730	Pengadilan Agama Bogor	329,00
19	005.04.400798	Pengadilan Agama Serang	103.455,00
20	005.04.401062	Pengadilan Agama Purwokerto	432.290,00
21	005.04.401169	Pengadilan Agama Sukoharjo	99.471,00
22	005.04.401762	Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan	250,00
23	005.04.402520	Pengadilan Agama Martapura	112.897,00
24	005.04.402996	Pengadilan Agama Cibadak	456.707,00
25	005.04.417851	Pengadilan Agama Pandeglang	3.200,00
26	005.04.632044	Pengadilan Agama Banjarbaru	2.475,00
27	005.04.663712	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	2.648.760,00
28	005.04.690140	Pengadilan Agama Batu Licin	58.301,00
29	005.05.526726	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan	101.737,00
Jumlah			98.186.302,00

Merupakan jasa giro yang berasal dari rekening Satuan Kerja yang belum mendaftarkan rekeningnya untuk mengikuti program *Treasury Notional Pooling* (TNP).

- Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji (425991) sebesar Rp45.318.483,00 terdapat pada 8 Satuan Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	Keterangan
1	005.01.097535	Pengadilan Negeri Tasikmalaya	8.895.600,00	Pengembalian persekot gaji an. Tuty Suryani SH, MH
2	005.01.098200	Pengadilan Negeri Jember	9.175.800,00	Pengembalian persekot gaji an. Ivan Budi Hartanto, SH, MH
3	005.01.098792	Pengadilan Negeri Pariaman	8.274.000,00	Pengembalian persekot gaji an. Syufrinaldi, SH
4	005.01.307491	Pengadilan Agama Sungguminasa	1.543.520,00	Pengembalian persekot gaji an. Muh. Sabir
5	005.01.401070	Pengadilan Agama Banyumas	801,00	Pengembalian persekot gaji an. Dahron, S.Ag., M.Si
6	005.01.401240	Pengadilan Agama Surabaya	8.956.560,00	Pengembalian persekot gaji an. Siti Aisyah, S.Ag
7	005.01.402302	Pengadilan Agama Pangkal Pinang	2,00	Pengembalian persekot gaji an. Hermanto SHI
8	005.01.547682	Pengadilan Agama Stabat	8.472.200,00	Pengembalian persekot gaji an. Febrizal Lubis S.Ag., S.H. M.H
Jumlah			45.318.483,00	

Merupakan pendapatan yang berasal dari pelunasan atas persekot gaji. Terdapat koreksi *audited* atas Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji pada beberapa Satuan Kerja dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kesalahan penyeteroran akun pada Satuan Kerja 005.01.099396 Pengadilan Negeri Luwuk sebesar Rp1.174.850,00 yang merupakan pengembalian kelebihan bayar belanja pegawai tahun berjalan atas Gaji Pokok PNS bulan Agustus 2021 dengan SPM nomor 00059 tanggal 9 Juli 2021 dan SP2D nomor 210531501000953 tanggal 1 Agustus 2021, dilakukan ralat SPM/SP2D menggunakan akun Beban Gaji Pokok PNS (51111) dan sebesar Rp55,00 yang merupakan pengembalian pembulatan gaji PNS bulan Oktober 2021 dengan SPM nomor 00083 tanggal 7 Oktober 2021 dan SP2D nomor 210531301006079 tanggal 8 Oktober 2021, dilakukan ralat SPM/SP2D menggunakan akun Beban Pembulatan Gaji PNS (51119) berdasarkan Surat Kasub Bag. Umum dan Keuangan/PPSPM Pengadilan Negeri Luwuk dengan Nomor W21.U3/689/KU.01/04/2022 tanggal 18 April 2022 dan telah terbit surat pengesahan atas ralat berdasarkan Surat Kepala KPPN Luwuk dengan Nomor S-013/WPB.27/KP.03/2021 tanggal 21 April 2022.
2. Kesalahan penginputan akun pada Satuan Kerja 005.01.099905 Pengadilan Negeri Dompu sebesar Rp374.498,00 yang merupakan sewa rumah dinas bulan Agustus s.d September 2021 dengan SPM nomor 00141/GI/IX/2021 tanggal 7 September 2021 dan SP2D nomor 210711503000715, dilakukan ralat SPM/SP2D menggunakan akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131) berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Dompu dengan Nomor W25-U5/413/KU.01/IV/2022 tanggal 18 April 2022 dan telah terbit surat pengesahan atas ralat berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Bima dengan Nomor S-171/KPN.2302/2022 tanggal 22 April 2022.

Atas hal tersebut, sudah dilakukan perbaikan pada Laporan Keuangan Tahun 2021 (*Audited*).

- Pendapatan Anggaran Lain-lain (425999) sebesar Rp6.192.718,00 terdapat pada 15 Satuan Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Pendapatan Anggaran Lain-lain	Keterangan
1	005.01.097610	Pengadilan Negeri Bekasi	478.667,00	Koreksi atas potongan sewa rumah dinas pegawai yang tidak menempati rumah dinas
2	005.01.097645	Pengadilan Negeri Bogor	4.221.332,00	Koreksi atas potongan sewa rumah dinas pegawai yang tidak menempati rumah dinas
3	005.01.097851	Pengadilan Negeri Blora	83.391,00	Penerimaan setoran/potongan PFK dalam pengajuan kekurangan THR
4	005.01.097940	Pengadilan Negeri Sragen	10.000,00	Tagihan bea materai KKP BRI bulan Juni 2021
5	005.01.400220	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	363.912,00	Merupakan Pembulatan Gaji PNS namun transaksi tersebut tidak terbaca Aplikasi eRekon dan Aplikasi SPAN dan disarankan oleh KPPN untuk melakukan ralat ke akun 425999
6	005.01.400662	Pengadilan Agama Bandung	570.000,00	Kelebihan pemotongan sewa rumah dinas akibat adanya mutasi pegawai, karena Satuan Kerja tersebut tidak memiliki rumah dinas maka dilakukan ralat dari akun 425131 ke akun 425999
7	005.01.400729	Pengadilan Agama Bogor	104.643,00	Koreksi atas potongan sewa rumah dinas 1 pegawai yang tidak menempati rumah dinas Bulan Agustus s.d Oktober 2021
8	005.01.401112	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	16.000,00	Kelebihan setoran pengembalian TUP Tahun 2021
9	005.01.401903	Pengadilan Negeri Meureudu	99.345,00	Pengembalian sisa UP Tahun 2020
10	005.01.401947	Pengadilan Agama Batusangkar	164.000,00	Kelebihan pemotongan sewa rumah dinas akibat adanya mutasi pegawai, karena Satuan Kerja tersebut tidak memiliki rumah dinas maka dilakukan ralat dari akun 425131 ke akun 425999
11	005.01.401957	Pengadilan Agama Soreang	58.806,00	Kelebihan pemotongan sewa rumah dinas akibat adanya mutasi pegawai, karena Satuan Kerja tersebut tidak memiliki rumah dinas maka dilakukan ralat dari akun 425131 ke akun 425999
12	005.01.526732	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	72,00	Satuan Kerja sudah melakukan ralat SPM pada tanggal 10 Februari 2021 untuk kekurangan gaji namun ditolak KPPN
13	005.01.663204	Pengadilan Militer I - 03 di Padang	50,00	Kelebihan setoran pengembalian TUP Tahun 2021
14	005.03.099062	Pengadilan Tinggi Jakarta	4.000,00	Kelebihan setoran pengembalian TUP Tahun 2021
15	005.03.099770	Pengadilan Negeri Soasui	18.500,00	Selisih kas pada kasir perdata yang disetorkan kepada Bendahara Penerimaan
Jumlah			6.192.718,00	

Terkait Penggunaan Kembali PNPB yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-446/MK.02/2020 perihal Persetujuan Penggunaan Dana PNPB pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebesar 21% dari target APBN yang telah disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp96.523.097.985,00.

Saat ini Penggunaan Dana PNBП pada Mahkamah Agung Republik Indonesia telah direalisasikan sebagai dana pendamping dari pagu anggaran rupiah murni.

Realisasi belanja penggunaan dana PNBП Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.907.537.150,00 atau 89,73% dari Anggaran Belanja PNBП sebesar Rp4.354.717.000,00.

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja penggunaan PNBП Mahkamah Agung Republik Indonesia 31 Desember 2021 per unit Eselon I tersaji sebagai berikut:

(*Dalam Rupiah*)

Uraian	Pagu PNBП	Realisasi Belanja PNBП	% Realisasi	Sisa
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	1.523.620.000,00	1.333.056.343,00	87,49	190.563.657,00
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	2.711.097.000,00	2.518.128.785,00	92,88	192.968.215,00
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN	120.000.000,00	56.352.022,00	46,96	63.647.978,00
Jumlah Belanja	4.354.717.000,00	3.907.537.150,00	89,73%	447.179.850,00

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja penggunaan PNBП Mahkamah Agung Republik Indonesia 31 Desember 2021 per Satuan Kerja pada unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tersaji sebagai berikut:

Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun 2021 (Audited)

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Pagu PNPB	Realisasi Belanja PNPB	% Realisasi	Sisa
1	00503-099062 Pengadilan Tinggi Jakarta	12.870.000,00	12.866.000,00	99,97	4.000,00
2	00503-099063 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3	00503-099064 Pengadilan Negeri Jakarta Barat	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4	00503-099065 Pengadilan Negeri Jakarta Timur	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5	00503-099067 Pengadilan Tinggi Bandung	82.870.000,00	79.464.000,00	95,89	3.406.000,00
6	00503-099074 Pengadilan Negeri Serang	6.470.000,00	0,00	0,00	6.470.000,00
7	00503-099077 Pengadilan Negeri Tangerang	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
8	00503-099090 Pengadilan Tinggi Semarang	52.870.000,00	52.772.498,00	99,82	97.502,00
9	00503-099092 Pengadilan Negeri Semarang	7.700.000,00	5.277.000,00	68,53	2.423.000,00
10	00503-099115 Pengadilan Negeri Surakarta	7.150.000,00	6.790.000,00	94,97	360.000,00
11	00503-099128 Pengadilan Negeri Yogyakarta	9.450.000,00	9.392.500,00	99,39	57.500,00
12	00503-099169 Pengadilan Tinggi Banda Aceh	90.740.000,00	87.870.000,00	96,84	2.870.000,00
13	00503-099189 Pengadilan Tinggi Medan	52.870.000,00	47.588.000,00	90,01	5.282.000,00
14	00503-099190 Pengadilan Negeri Medan	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
15	00503-099195 Pengadilan Negeri Rantau Prapat	5.650.000,00	0,00	0,00	5.650.000,00
16	00503-099200 Pengadilan Negeri Tarutung	5.150.000,00	0,00	0,00	5.150.000,00
17	00503-099204 Pengadilan Tinggi Padang	42.870.000,00	38.419.000,00	89,62	4.451.000,00
18	00503-099205 Pengadilan Negeri Padang	8.750.000,00	7.200.000,00	82,29	1.550.000,00
19	00503-099214 Pengadilan Negeri Pekanbaru	8.850.000,00	0,00	0,00	8.850.000,00
20	00503-099220 Pengadilan Negeri Jambi	5.300.000,00	2.515.000,00	47,45	2.785.000,00
21	00503-099225 Pengadilan Tinggi Palembang	42.870.000,00	42.443.226,00	99,00	426.774,00
22	00503-099226 Pengadilan Negeri Palembang	10.000.000,00	9.975.000,00	99,75	25.000,00
23	00503-099239 Pengadilan Negeri Pontianak	7.150.000,00	7.100.000,00	99,30	50.000,00
24	00503-099253 Pengadilan Tinggi Banjarmasin	62.870.000,00	59.579.870,00	94,77	3.290.130,00
25	00503-099254 Pengadilan Negeri Banjarmasin	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00	0,00
26	00503-099287 Pengadilan Negeri Samarinda	11.550.000,00	8.541.000,00	73,95	3.009.000,00
27	00503-099309 Pengadilan Negeri Balikpapan	7.300.000,00	7.055.800,00	96,65	244.200,00
28	00503-099313 Pengadilan Tinggi Manado	52.870.000,00	46.487.000,00	87,93	6.383.000,00
29	00503-099330 Pengadilan Negeri Manado	8.900.000,00	4.900.000,00	55,06	4.000.000,00
30	00503-099355 Pengadilan Negeri Tondano	8.050.000,00	6.000.000,00	74,53	2.050.000,00
31	00503-099423 Pengadilan Negeri Ujung Pandang	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
32	00503-099444 Pengadilan Negeri Pangkajene	8.500.000,00	8.400.000,00	98,82	100.000,00
33	00503-099692 Pengadilan Tinggi Ambon	80.870.000,00	77.928.125,00	96,36	2.941.875,00
34	00503-099774 Pengadilan Tinggi Denpasar	44.870.000,00	32.580.000,00	72,61	12.290.000,00
35	00503-099781 Pengadilan Negeri Denpasar	10.000.000,00	6.585.650,00	65,86	3.414.350,00
36	00503-099795 Pengadilan Negeri Singaraja	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00
37	00503-109064 Pengadilan Negeri Batam	10.650.000,00	9.650.005,00	90,61	999.995,00
38	00503-400023 Pengadilan Tinggi Jayapura	162.870.000,00	156.270.000,00	95,95	6.600.000,00
39	00503-400215 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
40	00503-400246 Pengadilan Tinggi Kupang	77.870.000,00	64.762.600,00	83,17	13.107.400,00
41	00503-400252 Pengadilan Tinggi Pontianak	52.870.000,00	46.636.000,00	88,21	6.234.000,00
42	00503-400343 Pengadilan Tinggi Yogyakarta	28.070.000,00	28.048.000,00	99,92	22.000,00
43	00503-400365 Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	42.870.000,00	34.974.500,00	81,58	7.895.500,00
44	00503-400396 Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00
45	00503-400493 Pengadilan Tinggi Pekanbaru	42.870.000,00	42.870.000,00	100,00	0,00
46	00503-400541 Pengadilan Tinggi Kendari	48.510.000,00	46.010.000,00	94,85	2.500.000,00
47	00503-400560 Pengadilan Tinggi Mataram	40.000.000,00	38.841.400,00	97,10	1.158.600,00
48	00503-663399 Pengadilan Tinggi Banten	32.870.000,00	31.355.000,00	95,39	1.515.000,00
49	00503-663404 Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	42.870.000,00	40.760.000,00	95,08	2.110.000,00
50	00503-664523 Pengadilan Tinggi Maluku Utara	67.870.000,00	66.729.169,00	98,32	1.140.831,00
51	00503-664540 Pengadilan Tinggi Gorontalo	42.870.000,00	39.980.000,00	93,26	2.890.000,00
52	00503-670211 Pengadilan Negeri Airmadidi	6.200.000,00	5.040.000,00	81,29	1.160.000,00
	Jumlah Belanja	123.810.000,00	109.658.500,00	88,57%	14.151.500,00

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja penggunaan PNPB Mahkamah Agung Republik Indonesia 31 Desember 2021 per Satuan Kerja pada unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tersaji sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Pagu PNPB	Realisasi Belanja PNPB	% Realisasi	Sisa
1	00504-309067 Pengadilan Tinggi Agama Makassar	143.836.000,00	142.544.700,00	99,10	1.291.300,00
2	00504-309124 Pengadilan Tinggi Agama Bandung	139.033.000,00	137.774.250,00	99,09	1.258.750,00
3	00504-309125 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	184.795.000,00	164.250.180,00	88,88	20.544.820,00
4	00504-401113 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	60.250.000,00	58.997.800,00	97,92	1.252.200,00
5	00504-401583 Mahkamah Syar'iyah Aceh	127.210.000,00	127.210.000,00	100,00	0,00
6	00504-401778 Pengadilan Tinggi Agama Medan	119.512.000,00	119.486.100,00	99,98	25.900,00
7	00504-401901 Pengadilan Tinggi Agama Padang	105.235.000,00	105.235.000,00	100,00	0,00
8	00504-402237 Pengadilan Tinggi Agama Palembang	77.344.000,00	77.229.300,00	99,85	114.700,00
9	00504-402450 Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin	80.650.000,00	71.874.000,00	89,12	8.776.000,00
10	00504-402481 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda	92.842.000,00	91.987.300,00	99,08	854.700,00
11	00504-402651 Pengadilan Tinggi Agama Pontianak	81.267.000,00	70.452.796,00	86,69	10.814.204,00
12	00504-402682 Pengadilan Tinggi Agama Manado	72.064.000,00	72.044.000,00	99,97	20.000,00
13	00504-402711 Pengadilan Tinggi Agama Ambon	58.993.000,00	57.193.000,00	96,95	1.800.000,00
14	00504-402789 Pengadilan Tinggi Agama Mataram	102.242.000,00	102.125.432,00	99,89	116.568,00
15	00504-402861 Pengadilan Tinggi Agama Jayapura	96.552.000,00	83.312.300,00	86,29	13.239.700,00
16	00504-402965 Pengadilan Tinggi Agama Semarang	174.130.000,00	144.826.800,00	83,17	29.303.200,00
17	00504-402971 Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru	102.310.000,00	100.904.800,00	98,63	1.405.200,00
18	00504-402990 Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya	89.614.000,00	88.890.195,00	99,19	723.805,00
19	00504-440713 Pengadilan Tinggi Agama Banten	78.184.000,00	71.294.000,00	91,19	6.890.000,00
20	00504-440729 Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung	50.779.000,00	49.565.200,00	97,61	1.213.800,00
21	00504-440735 Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	60.694.000,00	53.745.000,00	88,55	6.949.000,00
22	00504-440741 Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara	53.041.000,00	53.041.000,00	100,00	0,00
23	00504-547658 Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	84.539.000,00	78.909.000,00	93,34	5.630.000,00
24	00504-547662 Pengadilan Tinggi Agama Jambi	73.339.000,00	27.420.000,00	37,39	45.919.000,00
25	00504-547679 Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	88.313.000,00	88.182.232,00	99,85	130.768,00
26	00504-576250 Pengadilan Tinggi Agama Palu	75.619.000,00	70.219.000,00	92,86	5.400.000,00
27	00504-576254 Pengadilan Tinggi Agama Kendari	75.169.000,00	75.119.000,00	99,93	50.000,00
28	00504-576261 Pengadilan Tinggi Agama Kupang	90.868.000,00	73.426.400,00	80,81	17.441.600,00
29	00504-576275 Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu	72.673.000,00	60.870.000,00	83,76	11.803.000,00
Jumlah Belanja		2.711.097.000,00	2.518.128.785,00	92,88%	192.968.215,00

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja penggunaan PNPB Mahkamah Agung Republik Indonesia 31 Desember 2021 per Satuan Kerja pada unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara tersaji sebagai berikut:

(*Dalam Rupiah*)

No.	Uraian	Pagu PNPB	Realisasi Belanja PNPB	% Realisasi	Sisa
1	00505-526705 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negarajakarta	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
2	00505-526712 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negaraujung Pandang	30.000.000,00	19.891.922,00	66,31	10.108.078,00
3	00505-526726 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negaramedan	30.000.000,00	21.389.100,00	71,30	8.610.900,00
4	00505-548941 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	30.000.000,00	15.071.000,00	50,24	14.929.000,00
Jumlah Belanja		120.000.000,00	56.352.022,00	46,96%	63.647.978,00

Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan terdapat Estimasi dan Realisasi akun PNPB yang tidak sesuai, antara lain :

- a. Terdapat Estimasi dan Realisasi akun pendapatan yang tidak sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1704/SEK/KU.00/12/2019 Tanggal 10 Desember 2019 perihal Penghentian Pembayaran Persekot Gaji, yaitu akun:
 - 425991 Estimasi Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji;
 - 425991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji.
- b. Terdapat kesalahan dalam melakukan penyetoran Pendapatan DIPA Teknis dengan Kode Satuan Kerja DIPA 01 Badan Urusan Administrasi, yaitu akun:
 - 425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya sebesar Rp38.500,00 pada Satuan Kerja 005.01.099031 Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Satuan Kerja telah mengajukan ralat BPN ke KPPN dengan dasar surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor W9.U1/4903/KU.01/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021, tetapi sampai dengan 31 Desember 2021 belum terbit surat pengesahan atas ralat tersebut. Satuan Kerja telah mengajukan ralat kembali berdasarkan surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor W9.U/1315/KU.01/VIII/2021 tanggal 28 April 2022 atas:

(*Dalam Rupiah*)

No.	Kode Billing	NTPN	NTB	Nominal
1	820210309533778	82D5B7QLTSV5G42I	931596671901	8.500,00
2	820210315903082	6527B2G4UTH14G3A	000000034319	10.000,00
3	820210317152539	1FB618N3DNHP5K8R	210317219456	10.000,00
4	820210421293924	7CD2C48VUIQUEOR4	210427262156	10.000,00
Jumlah				38.500,00

Untuk Kode Billing 820210315903082 dengan No. NTPN 6527B2G4UTH14G3A sampai dengan batas akhir periode ralat tidak berhasil

dilakukan koreksi oleh KPPN karena ADK koreksi pada baris original data *error*.

Realisasi**Belanja**

Realisasi
Belanja
Negara
Rp10.509.307.
307.069,00

Belanja

Realisasi Belanja Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.509.307.307.069,00 atau 98,01% dari Anggaran Belanja sebesar Rp10.727.890.625.000,00.

Rincian Estimasi Belanja dan Realisasi Belanja Mahkamah Agung Republik Indonesia 31 Desember 2021 tersaji sebagai berikut:

Tabel 4. Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja

(Dalam Rupiah)

Uraian	2021				
	Anggaran	Realisasi Belanja Bruto	Pengembalian Belanja	Realisasi Belanja Neto	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	6.920.337.809.000,00	6.781.115.756.783,00	977.496.549,00	6.780.138.260.234,00	97,99
Belanja Barang	2.206.573.688.000,00	2.140.360.883.318,00	3.725.804.173,00	2.136.635.079.145,00	97,00
Belanja Modal	1.600.979.128.000,00	1.593.307.535.347,00	773.567.657,00	1.592.533.967.690,00	99,52
Jumlah Belanja	10.727.890.625.000,00	10.514.784.175.448,00	5.476.868.379,00	10.509.307.307.069,00	98,01

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan rincian Realisasi Belanja Per 31 Desember 2021 per Program adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian Belanja Berdasarkan Program

(Dalam Rupiah)

Program	2021		%
	Anggaran	Realisasi	
Rupiah Murni			
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	158.926.558.000,00	153.668.479.211,00	96,69
Program Dukungan Manajemen	10.555.959.090.000,00	10.343.199.522.115,00	97,98
Jumlah Belanja Rupiah Murni	10.714.885.648.000,00	10.496.868.001.326,00	97,97
PNBP			
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	4.354.717.000,00	3.858.794.071,00	88,61
Jumlah Belanja PNBP	4.354.717.000,00	3.858.794.071,00	88,61
Hibah Langsung Dalam Negeri			
Program Dukungan Manajemen	8.650.260.000,00	8.580.511.672,00	99,19
Jumlah Belanja Hibah Langsung Dalam Negeri	8.650.260.000,00	8.580.511.672,00	99,19
Jumlah Belanja	10.727.890.625.000,00	10.509.307.307.069,00	97,96

Realisasi Belanja Per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.509.307.307.069,00 dibandingkan 31 Desember 2020 sebesar Rp9.406.446.508.251,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.102.860.798.818,00 atau sebesar 11,72%.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	(Rp)	%
Belanja Pegawai	6.780.138.260.234,00	6.715.009.279.141,00	65.128.981.093,00	0,97
Belanja Barang	2.136.635.079.145,00	2.044.407.831.008,00	92.227.248.137,00	4,51
Belanja Modal	1.592.533.967.690,00	647.029.398.102,00	945.504.569.588,00	146,13
Jumlah Belanja	10.509.307.307.069,00	9.406.446.508.251,00	1.102.860.798.818,00	11,72

Kenaikan Realisasi Belanja disebabkan antara lain:

1. Kenaikan Belanja Pegawai

Terdapat penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2020 yang mulai melaksanakan tugas pada bulan Februari 2021 sebanyak 2.085 pegawai sehingga menyebabkan kenaikan belanja pegawai Tahun 2021.

2. Kenaikan Belanja Barang

Kenaikan belanja operasional, belanja non operasional, belanja barang persediaan, belanja pemeliharaan, serta belanja jasa dikarenakan antara lain:

- Adanya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1068/SEK/SK/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Standar Biaya Sewa Rumah Dinas dan Transportasi Hakim Bagi Hakim dan Hakim Ad Hoc di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun 2022;
- Peningkatan Layanan Internet Satuan Kerja Daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan persidangan yang selama ini terkendala oleh kualitas sinyal internet yang tidak stabil sehingga mengakibatkan proses persidangan tidak lancar;
- Adanya kenaikan pagu anggaran belanja barang sehingga menyebabkan kenaikan belanja barang Tahun 2021;
- Adanya pembayaran Insentif WBK dan WBBM kepada Satuan Kerja yang memperoleh penghargaan WBK dan WBBM dengan akun belanja operasional lainnya;
- Belanja barang non operasional sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 pada lingkungan kantor.

3. Kenaikan Belanja Modal

Kenaikan belanja modal dikarenakan antara lain:

- Adanya pembangunan 24 gedung kantor pengadilan Satuan Kerja baru (*multiyears*);
- Adanya pembangunan 12 gedung kantor pengadilan Satuan Kerja baru (*singleyear*);
- Adanya kenaikan pagu anggaran belanja modal sehingga menyebabkan kenaikan belanja modal Tahun 2021.

Realisasi

B.2 Belanja Pegawai

Belanja

Realisasi Belanja Pegawai pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp6.780.138.260.234,00 dan Rp6.715.009.279.141,00 atau terjadi kenaikan sebesar Rp65.128.981.093,00 atau 0,97%.

Pegawai

Rp6.780.138.260.234,00

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Pegawai

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	2021	2020	(Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.711.629.306.250,00	4.501.521.279.015,00	210.108.027.235,00	4,67
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	43.602.286.929,00	44.896.533.927,00	(1.294.246.998,00)	(2,88)
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	68.919.530.980,00	59.550.841.405,00	9.368.689.575,00	15,73
Belanja Lembur	217.706.000,00	113.917.000,00	103.789.000,00	91,11
Belanja Tunj. Khusus dan Belanja Pegawai Transito	1.956.746.926.624,00	2.111.153.945.011,00	(2.227.237.217,00)	(0,11)
Realisasi Belanja Bruto	6.781.115.756.783,00	6.717.236.516.358,00	63.879.240.425,00	0,95
Pengembalian Belanja	(977.496.549,00)	(2.227.237.217,00)	1.249.740.668,00	(56,11)
Realisasi Belanja Neto	6.780.138.260.234,00	6.715.009.279.141,00	65.128.981.093,00	0,97

Terdapat Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi Belanja pada 2 Satuan Kerja karena tidak memiliki pagu anggaran pada akun tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Kode Perkiraan	Realisasi	Pengembalian	Realisasi Neto	Keterangan
1	00501.097908	Pengadilan Negeri Kebumen	511157	0,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	Satker tidak memiliki pagu anggaran Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim (511157) karena bukan termasuk wilayah yang mendapatkan Tunjangan tsb. Hal ini karena adanya pegawai hakim yang pindah mutasi dari Pengadilan Negeri Tarakan ke Pengadilan Negeri Kebumen
2	00501.401200	Pengadilan Agama Sleman	511157	0,00	2.700.000,00	(2.700.000,00)	Satker tidak memiliki pagu anggaran Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim (511157) karena bukan termasuk wilayah yang mendapatkan Tunjangan tsb. Hal ini karena adanya pegawai hakim yang pindah mutasi dari Pengadilan Agama Takalar dan Pengadilan Agama Bangkinang ke Pengadilan Agama Sleman

Realisasi

Belanja

Barang

Rp2.136.635.0

79.145,00

B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.136.635.079.145,00 dan Rp2.044.407.831.008,00.

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp92.227.248.137,00 atau 4,51% dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2020.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Barang

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	2021	2020	(Rp)	%
Belanja Barang Operasional	732.500.438.574,00	699.080.473.493,00	33.419.965.081,00	4,78
Belanja Barang Non Operasional	96.298.359.946,00	99.079.110.264,00	(2.780.750.318,00)	(2,81)
Belanja Barang Persediaan	101.178.354.986,00	100.094.595.987,00	1.083.758.999,00	1,08
Belanja Jasa	469.906.709.427,00	432.262.237.060,00	37.644.472.367,00	8,71
Belanja Pemeliharaan	364.728.053.273,00	359.650.175.472,00	5.077.877.801,00	1,41
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	375.748.967.112,00	356.821.400.515,00	18.927.566.597,00	5,30
Belanja Perjalanan Luar Negeri	0,00	344.023.126,00	(344.023.126,00)	(100,00)
Realisasi Belanja Bruto	2.140.360.883.318,00	2.047.332.015.917,00	93.028.867.401,00	4,54
Pengembalian Belanja	(3.725.804.173,00)	(2.924.184.909,00)	(801.619.264,00)	27,41
Realisasi Belanja Neto	2.136.635.079.145,00	2.044.407.831.008,00	92.227.248.137,00	4,51

Penjelasan:

1. Belanja Pemeliharaan Lainnya (523199) sebesar Rp35.002.100,00 pada Satuan Kerja 005.01.526732 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta merupakan belanja pemeliharaan rumah dinas seharusnya menggunakan akun 523119 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya, Satuan Kerja tidak dapat melakukan ralat SPM/SP2D dan Revisi DIPA karena pada saat melakukan revisi DIPA, pagu anggaran akun 523119 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya tidak mencukupi.
2. Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19 (524115) sebesar Rp21.350.996,00 terdapat pada 2 Satuan Kerja dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	Keterangan
1	005.01.548940	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	7.483.996,00	Pengeluaran untuk jasa swab antigen/PCR dalam rangka perjalanan dinas, tidak dapat dilakukan Revisi DIPA dan ralat SPM/SP2D menjadi Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (522192), karena tidak memiliki sisa pagu yang cukup untuk dilakukan Revisi DIPA dan ralat SPM/SP2D
2	005.05.548941	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	13.867.000,00	
Jumlah			21.350.996,00	

*Realisasi***B.4 Belanja Modal***Belanja**Modal**Rp1.592.533.967.690,00*

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.592.533.967.690,00 dan Rp647.029.398.102,00. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp945.504.569.588,00 atau 146,13% dari Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2020.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal*(Dalam Rupiah)*

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	2021	2020	(Rp)	%
Belanja Modal Tanah	1.298.970.000,00	396.551.862,00	902.418.138,00	227,57
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	437.678.377.774,00	186.913.666.496,00	250.764.711.278,00	134,16
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.145.599.478.878,00	458.406.092.384,00	687.193.386.494,00	149,91
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	297.285.835,00	75.396.000,00	221.889.835,00	294,30
Belanja Modal Lainnya	8.433.422.860,00	1.329.042.000,00	7.104.380.860,00	534,55
Realisasi Belanja Bruto	1.593.307.535.347,00	647.120.748.742,00	946.186.786.605,00	146,21
Pengembalian Belanja	(773.567.657,00)	(91.350.640,00)	(682.217.017,00)	746,81
Realisasi Belanja Neto	1.592.533.967.690,00	647.029.398.102,00	945.504.569.588,00	146,13

*Realisasi***B.4.1 Belanja Modal Tanah***Belanja**Modal Tanah**Rp1.298.970.000,00*

Realisasi Belanja Modal Tanah pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.298.970.000,00 dan Rp396.551.862,00. Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp902.418.138,00 atau 227,57% dari Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2020.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah*(Dalam Rupiah)*

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	2021	2020	(Rp)	%
Belanja Modal Tanah	1.273.160.000,00	367.271.662,00	905.888.338,00	246,65
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	25.810.000,00	29.280.200,00	(3.470.200,00)	(11,85)
Realisasi Belanja Bruto	1.298.970.000,00	396.551.862,00	902.418.138,00	227,57
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja Neto	1.298.970.000,00	396.551.862,00	902.418.138,00	227,57

Belanja**Modal****Peralatan dan****Mesin**

*Rp437.667.359
.774,00*

B.4.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp437.667.359.774,00 dan Rp186.913.666.496,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp250.753.693.278,00 atau 134,15% dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2020.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tersebut antara lain:

Tabel 11. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	2021	2020	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	437.678.377.774,00	184.336.980.146,00	253.341.397.628,00	137,43
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	0,00	1.950.000,00	(1.950.000,00)	(100,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi	0,00	2.514.136.350,00	(2.514.136.350,00)	(100,00)
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0,00	60.600.000,00	(60.600.000,00)	(100,00)
Realisasi Belanja Bruto	437.678.377.774,00	186.913.666.496,00	250.764.711.278,00	134,16
Pengembalian Belanja	(11.018.000,00)	0,00	(11.018.000,00)	0,00
Realisasi Belanja Neto	437.667.359.774,00	186.913.666.496,00	250.753.693.278,00	134,15

Realisasi**Belanja****Modal Gedung****dan Bangunan**

*Rp1.144.836.9
29.221,00*

B.4.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.144.836.929.221,00 dan Rp458.314.741.744,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp686.522.187.477,00 atau 149,79% dari Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada 31 Desember 2020.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tersebut antara lain:

Tabel 12. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	2021	2020	(Rp)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	831.375.325.263,00	172.191.207.540,00	659.184.117.723,00	382,82
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	314.224.153.615,00	286.214.884.844,00	28.009.268.771,00	9,79
Realisasi Belanja Bruto	1.145.599.478.878,00	458.406.092.384,00	687.193.386.494,00	149,91
Pengembalian Belanja	(762.549.657,00)	(91.350.640,00)	(671.199.017,00)	734,75
Realisasi Belanja Neto	1.144.836.929.221,00	458.314.741.744,00	686.522.187.477,00	149,79

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp297.285.835,00

B.4.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp297.285.835,00 dan Rp75.396.000,00. Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp221.889.835,00 atau 294,30% dibandingkan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2020.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tersebut antara lain:

Tabel 13. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	2021	2020	(Rp)	%
Belanja Modal Jaringan	97.289.500,00	0,00	97.289.500,00	0,00
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	199.996.335,00	75.396.000,00	124.600.335,00	165,26
Realisasi Belanja Bruto	297.285.835,00	75.396.000,00	221.889.835,00	294,30
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja Neto	297.285.835,00	75.396.000,00	221.889.835,00	294,30

Realisasi Belanja Modal Lainnya Rp8.433.422.860,00

B.4.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp8.433.422.860,00 dan Rp1.329.042.000,00. Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp7.104.380.860,00 atau 534,55% dibandingkan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2020.

Perbandingan rincian Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 antara lain:

Tabel 14. Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Lainnya

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	2021	2020	(Rp)	%
Belanja Modal Lainnya	8.323.422.860,00	1.207.937.500,00	7.115.485.360,00	589,06
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset	110.000.000,00	121.104.500,00	(11.104.500,00)	(9,17)
Realisasi Belanja Bruto	8.433.422.860,00	1.329.042.000,00	7.104.380.860,00	534,55
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja Neto	8.433.422.860,00	1.329.042.000,00	7.104.380.860,00	534,55

Realisasi
Belanja
Barang
Terdampak
COVID-19
Rp42.914.644.
709,00

B.4.6 Belanja Terdampak COVID-19

Belanja Barang

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp44.750.308.000,00. Realisasi atas anggaran tersebut sebesar Rp42.914.644.709,00 atau 95,90% dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Kode Perkiraan	Uraian	Pagu	Realisasi	%
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	8.666.356.000,00	8.460.534.873,00	97,63
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	5.766.518.000,00	5.176.691.055,00	89,77
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	10.153.683.000,00	10.099.465.389,00	99,47
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	20.089.486.000,00	19.123.644.124,00	95,19
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	40.140.000,00	36.117.272,00	89,98
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	34.125.000,00	18.191.996,00	53,31
Jumlah		44.750.308.000,00	42.914.644.709,00	95,90

B.5 Informasi Anggaran, Realisasi Anggaran, Target Dan Realisasi Output Prioritas Nasional Tahun 2021

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, pada Mahkamah Agung terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN III),
2. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN VI).
3. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN VII).

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Target dan Realisasi Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

PN III: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
Pagu Anggaran PN III adalah Rp2.789.960.000,00 dan total realisasi sebesar Rp2.759.794.317,00. Beberapa Program/Kegiatan dalam PN III ini antara lain sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
1	Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan/ Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan	689.960.000,00	660.997.500,00	95,80	Orang	3.306	2.928	88,57
2	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda/ Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	2.100.000.000,00	2.098.796.817,00	99,94	Orang	160	197	123,13
Jumlah		2.789.960.000,00	2.759.794.317,00	98,92				

PN VI: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pagu Anggaran PN III adalah Rp2.100.000.000,00 dan total realisasi sebesar Rp2.098.414.796,00. Beberapa Program/Kegiatan dalam PN III ini antara lain sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup/	2.100.000.000,00	2.098.414.796,00	99,92	Orang	160	176	110
Jumlah		2.100.000.000,00	2.098.414.796,00	99,92				

PN VII: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Pagu Anggaran PN VII adalah Rp68.070.545.000 dan total realisasi sebesar Rp65.194.948.769. Beberapa Program/Kegiatan dalam PN VII ini antara lain sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

No	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
1	Penegakan Hukum Nasional/ Penataan Regulasi	800.000.000,00	799.953.015,00	99,99	Dokumen	1	1	100
2	Penegakan Hukum Nasional/ Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata	9.867.192.000,00	8.830.147.411,00	89,49				
	Pengembangan prosedur beracara secara elektronik di pengadilan (e-Court)	1.000.000.000,00	681.470.095,00	68,15	NPSK	1	1	100
	Diklat Sertifikasi Hakim Niaga	900.000.000,00	898.626.633,00	99,59	Hakim	50	107	214
	Diklat Sertifikasi Hakim Mediator	2.100.000.000,00	2.098.101.361,00	99,91	Hakim	500	544	108,8
	Kebijakan Penguatan Kelembagaan Jurusita dalam Optimalisasi Pelaksanaan Eksekusi Perdata	500.000.000,00	499.936.066,00	99,99	Dokumen	1	1	100
	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara berbasis Keadilan Restoratif	1.573.592.000,00	1.500.756.550,00	95,37	Orang	300	392	130,67
	Peningkatan Fungsi SPPT TI di Pengadilan	2.200.000.000,00	1.566.321.101,00	71,20	stem Inform	1	1	100
	Peningkatan Zona Integritas Wilayah II	1.593.600.000,00	1.584.935.605,00	99,46	Laporan	40	152	380
3	Penegakan Hukum Nasional/ Peningkatan Akses terhadap Keadilan	57.403.353.000,00	55.564.848.343,00	96,80	Orang	271.158	256.140	94,46
Jumlah		77.937.737.000,00	74.025.096.180,00	94,98				